



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BUMDES DI DESA-DESA DI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Biana Adha Inapty¹, M. Ali Fikri², Iman Waskito³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19 April 2022

Disetujui: 21 April 2022

Dipublikasikan: 22 April 2022

Kata Kunci:

*Village Government
BUMDes (Village
Owned Enterprise)
Problems*

Abstrak

Bumdes sebagai salah satu unit usaha diharapkan dapat menjadi *revenue generating* bagi desa. Namun dalam realitanya menghadapi berbagai macam permasalahan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dilapangan. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan informan kepala desa, pengelola bumdes, pendamping lokal desa. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang masih dihadapi oleh Bumdes adalah mengenai lemahnya kuitas sumber daya manusia, regulasi, rendahnya persentase penyertaan modal oleh desa ke Bumdes, pembukuan, evaluasi, kerjasama belum banyak dilakukan dengan pihak luar, produk dari masyarakat belum ditampung oleh Bumdes, potensi desa banyak yang belum digali dan dikembangkan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya komitmen pimpinan yang kuat, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, menggali potensi desa. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi desa maupun Bumdes dalam mengelola unit bsnisnya

IDENTIFICATION OF BUMDES (VILLAGE OWNED ENTERPRISE) PROBLEMS IN VILLAGES OF GUNUNG SARI DISTRICT OF LOMBOK BARAT REGENCY

Keyword:

*Village
Government
BUMDes (Village
Owned
Enterprise)
Problems*

Abstract

BUMDes (Village Owned Business) is a business unit that is hoped to become a revenue generating unit for the Village Government. In reality, Bumdes faces many problems. Related to this fact, our research tries to identify problems that occur in the field. Methodology of this research is qualitative research with village heads, BUMDes managers, and local village assistants as informants. The results show that the problems that are still faced by BUMDes are low quality of human resources, regulation, the small percentage of capital participation by villages to BUMDES, bookkeeping, evaluation, cooperation has not been widely carried out with outside parties, products from the community have not been accommodated by BUMDes, much of village potential have not been explored and developed. We suggest the importance of a strong commitment of the leaders, improve the human resources capability, create collaboration with many parties, explore the village potentials. The implication of this research is hoped to become an additional information for the Village Government and Bumdes in managing their business units

[✉] Alamat korespondensi:

¹bianainapty@unram.ac.id, ²fikrisampala@unram.ac.id, ³waskitoiman@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Bumdes merupakan kekuatan ekonomi baru bagi pengembangan desa di Indonesia. Pemerintah desa dapat memperbaiki peran Bumdes tidak hanya sebagai mediator dana pemerintah namun sebagai fasilitator yang mendorong aktivitas ekonomi pedesaan yang bernilai tambah (Srirejeki, 2018). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diatur dalam Pasal 135 Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 47/2015). Dalam pengembangan dan pembangunan desa, pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat kepada desa untuk dapat mendirikan Bumdes.

Penyeleggaraan pembentukan Bumdes begitu gencar dilakukan dan diketahui bahwa hingga tahun 2017 lebih dari 22.000 desa telah memiliki Bumdes, namun Bumdes yang aktif berkegiatan kurang dari 20% (Suryanto, 2018 dalam Hidayah dkk., 2019). Keadaan ini menunjukkan bahwa Bumdes belum dapat memberikan kontribusi lebih sebagai kekuatan ekonomi di Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri dari data yang di keluarkan Satker (Direktorat PUED Kemendes PDTT) pada tahun 2015, dari jumlah Desa sebanyak 995, desa yang memiliki bumdes sebanyak 420, dengan jumlah Bumdes yang aktif sebanyak 224, jumlah Bumdes yang kurang aktif sebanyak 67, jumlah Bumdes tidak aktif sebanyak 83, dan jumlah Bumdes yang baru dibentuk sebanyak 45 (Inapty dkk., 2021).

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Bumdes-Bumdes di Desa-Desa di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Lokasi penelitian dilakukan pada Bumdes-Bumdes di Desa-Desa di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat karena berdasarkan data BPMPD tahun 2015, seluruh desa-desa di Kec. Gunung Sari memiliki Bumdes namun keaktifannya masih dipertanyakan, terlebih dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ternyata Bumdes-Bumdesnya tidak banyak mengalami perubahan. Banyak desa yang masih sedikit untuk mengalokasikan dana desa untuk Bumdes. Dari komunikasi pendahuluan yang dilakukan peneliti diketahui bahwa alokasi dana yang diberikan ke BUMDes hanya Rp.5 – 12 juta dari dana desa yang berkisar Rp.800 juta, atau hanya sekitar 1-2%. Padahal dalam Permendesa No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 telah ada disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk penyertaan modal ke Bumdes.

Desa perlu menggiatkan bidang usaha ekonomi produktifnya yaitu dengan membentuk maupun mengaktifkan Bumdes dalam rangka meningkatkan **“Revenue Generating”**. Pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan Bumdes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga diperlukan keunggulan kompetitif. Modal social, modal manusia, dan modal finansial merupakan penentu keunggulan kompetitif sebagaimana yang

terdapat pada teori *resource based view* (De Massis et al., 2015). Modal sosial berhubungan dengan hubungan antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial). Definisi modal sosial dikutip dari World Bank (1998), “*social capital is a society include the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development*”. Dalam modal sosial dibutuhkan suatu “nilai saling berbagi” (*shared values*) secara pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan – hubungan personal (*personal relationship*), kepercayaan (*trust*) dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka. Selain modal sosial, keunggulan kompetitif dari organisasi ditentukan juga oleh modal manusia. Modal manusia diartikan sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang melekat pada orang (Hatch et al, 2004 dalam De Massis et al., 2015)). Modal manusia dapat dihubungkan dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi (Suarez et al., 2001), motivasi dan hubungan personal yang tinggi (Rodríguez & Tàpies, 2010)

Analisis masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori *resource based view* dengan pertimbangan karena keunggulan kompetitif diperlukan dalam mengembangkan Bumdes agar pengelolaannya menjadi lebih baik. Tentunya keterlibatan berbagai pihak sangat berperan dalam mengembangkan Bumdes. Dalam *stakeholder theory*, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman et al., 1983 dalam (Mitchell et al., 1997). Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut yaitu kekuasaan (*power*), legitimasi, dan urgensi. *Stakeholder theory* dibutuhkan dalam penelitian ini karena untuk mengelola dan mengembangkan Bumdes peran dari pemangku kepentingan yang memiliki *power*, legitimasi dan urgensi sangat diperlukan agar Bumdes dapat berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Jejak digital terkait penelitian mengenai permasalahan Bumdes sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti (Kusuma & Purnamasari, 2016), dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan komunikasi; akses masyarakat; transparansi dan akuntabilitas; kapasitas manajerial; infrastruktur, kebersihan, dan optimalisasi sarana; akses terhadap air; *legal standing* merupakan hal yang sering dijumpai pada Bumdes. Pada penelitian yang dilakukan di Desa Tebih Mandiri, penyebab terhambatnya Bumdes disebabkan karena factor persoalan kepemimpinan, manajerial, tata kelola pemerintah desa, hal ini karena terkait kualitas dan kapasitas pengetahuan yang dimiliki seorang pengelola Bumdes serta kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan pengurus yang menjadi penyebab kurang berkembangnya Bumdes (Mayu & Adlin, 2016). Persoalan kepemimpinan, manajerial, tata kelola juga diungkap oleh (Eko dkk., 2014).

Permasalahan penting pada Bumdes juga terkait dengan kualitas dan kapasitas direktur, tradisi berdesa, warga yang tidak paham tentang Bumdes, tidak tepanya pemilihan terhadap unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Direktur Bumdes terpilih yang berasal dari tokoh masyarakat belum dapat menjamin mereka memiliki kapasitas kewirausahaan (Hastowiyono

et al., 2014). Permasalahan Bumdes lainnya juga terdapat pada penelitian Sahrul Aksa (2013) dalam (Mayu & Adlin, 2016) yang menunjukkan bahwa permasalahan – permasalahan Bumdes dapat timbul karena adanya *misscommunication* antar pengurus Bumdes terkait mengenai administrasi keuangan, skala dan jangkauan usaha yang rentan untuk gulung tikar, emansipasi lokal, jalinan kerjasama antar Bumdes tidak terjadi tentu akan menjadi faktor penghambat, tradisi berdesa seperti solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong yang tidak tercipta maka dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya Bumdes. Faktor utama yang menghambat Bumdes terkait kualitas sumber daya manusia juga diteliti (Yudiardi & Karlina, 2017) serta (Sumaryadi & Saputra, 2017). Faktor lainnya adalah kesalahan dalam melakukan identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alokasi modal Bumdes yang kecil dari Dana Desa serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan (Syncore, 2017 dalam Harto & Riwandari, 2018).

Alasan ketertarikan penelitian ini karena masih beragamnya permasalahan Bumdes yang ditemukan pada penelitian terdahulu. Selain itu penelitian identifikasi permasalahan Bumdes yang akan dilakukan di Kecamatan Gunung Sari ini belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian di wilayah Lombok Barat yaitu (Inapty dkk., 2021) melakukan penelitian pada Bumdes – Bumdes di Kec. Lingsar. Dengan demikian *novelty* dari penelitian ini dengan penelitian (Inapty dkk., 2021) terletak pada sisi lokasi; informan dimana pada penelitian ini selain kepala desa, pengelola Bumdes juga meminta pendapat dari Pendamping Lokal Desa sedangkan penelitian terdahulu meminta pendapat dari fasilitator Kabupaten; penambahan cakupan pertanyaan terkait regulasi dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Bumdes-Bumdes di Desa-Desa di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Berdasarkan fenomena dan beragamnya hasil penelitian terdahulu menjadi memotivasi untuk dilakukannya penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dilakukan pada Bumdes di desa – desa di Kecamatan Gunung Sari.

Kajian penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* kualitatif. Alasan penelitian ini dilakukan pada Bumdes di Kecamatan Gunung Sari karena banyak yang tidak aktif meski sudah terbentuk dan kalau statusnya aktif namun Bumdes belum berjalan optimal atau berkembang dengan baik, padahal pemerintah telah memberikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui teknik *observasi*, wawancara dan studi kepustakaan. Data selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan

“fenomenologi deontologi” yang bertujuan menyingkapi fenomena yang terjadi dengan ikut menyertakan nilai-nilai alturisme untuk menganalisis peristiwa tersebut ((Sanders, 1982), Etzioni, 1992 dan Fikri, 2010). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), pengelola Bumdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan yang terlibat dalam proses wawancara dalam penelitian ini memberikan keterangan terkait permasalahan Bumdes di Kecamatan Gunung Sari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan Bumdes yang terjadi pada Bumdes di kecamatan Gunung Sari masih berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia yaitu lemahnya kapasitas manajerial; permasalahan regulasi; kurangnya transparansi pada pengelolaan keuangan Bumdes. Temuan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Inapty dkk., 2021), (Kusuma & Purnamasari, 2016); (Yudiardi & Karlina, 2017); (Sumaryadi & Saputra, 2017) Mayu dan Aldin (2016). Sebagaimana diungkap oleh Mayu dan Aldin (2016), bahwa penghambat tumbuh dan berkembangnya Bumdes di Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu disebabkan karena permasalahan faktor kepemimpinan, manajerial, tata kelola pemerintah desa, sebagai akibat lemahnya kualitas dan kapasitas pengetahuan pengelola Bumdes serta kurangnya sumber daya manusia yang ada dan pengetahuan pengurus sehingga menjadi penyebab kurang berkembangnya Bumdes di Desa Tebih Mandiri.

Permasalahan Bumdes yang diidentifikasi lainnya di Kecamatan Gunung Sari adalah persentase penyertaan modal pemerintah desa kepada Bumdes tergolong kecil seperti yang diungkapkan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai berikut:

” Penyertaan modal Bumdes menurut Peraturan Bupati seharusnya 10% dari Dana Desa, namun desa takut untuk memberikan nilai sebesar itu karena transparansi kurang, selama ini pengelola tidak mengembalikan modal tersebut. Sedangkan desa cenderung menginginkan PADes yang instan yaitu dari pada digunakan untuk usaha, toko desa lebih senang mereka sewakan. Selama ini tidak ada kontribusi Bumdes ke desa sehingga tidak ada tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes). Permasalahan lainnya belum adanya penguatan regulasi untuk produk lokal desa, tidak ada koordinasi berkesinambungan dengan instansi terkait misal pelatihan dari Desperindag atau Dinas Koperasi masih setengah hati....., ”

Selain itu kurangnya evaluasi oleh pemerintah desa diungkap oleh informan baik yang berasal dari Desa Midang, Sesela maupun Kekait, pemahaman masyarakat mengenai Bumdes yang kurang baik, kemudian kepengurusan dan pengelolaan yang tidak optimal, pemilihan usaha yang dirasa kurang tepat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumaryadi & Saputra, 2017) serta (Yudiardi & Karlina, 2017) serta pendapat (Hastowiyono et al., 2014) yang mengemukakan bahwa persoalan yang paling serius dalam

Bumdes adalah kualitas dan kapasitas direktur, tradisi berdesa, ketidakpahaman warga terhadap Bumdes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Permasalahan diatas tidak jauh berbeda dengan yang dialami di Bumdes Bukit Tinggi sebagaimana yang diungkap Kepala Desanya.

“Pengurus Bumdes itu dia kurang pro aktif, apalagi pemahaman masyarakat untuk memiliki Bumdes masih kurang, dimana masyarakat masih menganggap modal Bumdes banyak habis di pengurus Bumdes, belum lagi kurangnya pembinaan dari swasta, selain itu Pendamping Desa tidak maksimal karena yang ditangani banyak yaitu satu pendamping desa menangani 3 sampai 4 desa, kesejahteraan pengurus Bumdes masih rendah, usaha yang berjalan di Bumdes saat ini masih usaha Waserda dan simpan pinjam.....”

Hal ini dikuatkan juga dengan informasi yang diberikan pengelola Bumdes di Desa Midang.

“ Bumdes kami kemaren berjalan kurang optimal karena terkendala masalah gempa yang terjadi, kemudian kurang pengurusnya, pengurus yang ada memiliki kesibukan lain, sekarang baru dirintis lagi. Penyertaan modal Desa ke Bumdes sekitar Rp.50 Juta, pembukuannya masih sangat sederhana sekali, Kerjasama juga belum kami lakukan, untuk jenis usaha kayaknya masih kurang tepat, potensi usaha yang bisa dikembangkan itu ada mata air sama BUMDes Mart, BuMDes kami belum menampung hasil produk masyarakat..... ”

Namun keadaan di Bumdes Kekait sedikit berbeda dibandingkan Bumdes di Sesela maupun Midang, dimana alokasi penyertaan modal yang diberikan ke Bumdes lebih besar dibandingkan yang lain, dan sudah melakukan pembagian bagi hasil usaha, hal ini sebagaimana diungkap oleh Kepala Desa Kekait

“ Untuk Bumdes, kami alokasikan cukup besar sekitar Rp 139.000.000,- dari Dana Desa dengan harapan agar Bumdes dapat berkembang”. Sudah ada SHU, SHU dialokasikan yang 12% untuk Desa, pengawas & pembina sebesar 8%, pengurus 20%, Dana Sos 10%, tabungan 10% dan cadangan 5%.”

Kemudian kurangnya kerjasama seperti yang diungkap oleh Kades Bukit Tinggi maupun pengelola Bumdes di Midang, baik dengan Bumdes lain maupun kerjasama dengan pihak eksternal lainnya merupakan permasalahan yang dijumpai sebagaimana yang diungkapkan oleh (De Massis et al., 2015) bahwa modal sosial terkait dengan hubungan antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal) dan diungkap juga pada penelitian yang dilakukan oleh (Sumaryadi & Saputra, 2017) dan (Yudiardi & Karlina, 2017) yang mengungkapkan bahwa faktor utama yang menghambat Bumdes adalah kualitas sumber daya manusia. Permasalahan terkait tidak adanya kerjasama dan kurangnya sumber daya manusia, lemahnya regulasi, kurangnya pengawasan, juga dialami di Bumdes –

Bumdes di Kecamatan Gunung Sari. Faktor lainnya adalah kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alokasi modal Bumdes yang kecil dari dana desa serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan (Syncore, 2017 dalam Harto & Riwandari, 2018). Permasalahannya terkait administrasi dan laporan pertanggungjawaban juga menjadi masalah klasik sebagaimana yang terjadi di Bumdes – Bumdes di Kecamatan Gunung Sari, dimana untuk pencatatan pembukuan masih dilakukan secara manual dan sederhana.

Saat ini desa–desa dikecamatan Gunung Sari masih menggali potensi desa yang dapat dikembangkan dan dijadikan usaha bagi Bumdes. Penggalan potensi desa atau usaha diharapkan dapat menjadi keunggulan kompetitif sehingga dapat memajukan desa. Potensi yang digali oleh beberapa desa di Kecamatan Gunung Sari diharapkan dapat dikembangkan sebagai desa wisata seperti di daerah Desa Bukit Tinggi, karena sedang dibangun proyek strategis Nasional. Desa Midang dengan potensi sumber mata airnya namun pengembangannya terkendala klaim dan banyaknya persyaratan dari masyarakat setempat, Desa Midang ingin menjadikan desanya sebagai icon pariwisata yang mendukung program pemerintah daerah “Zero Waste”. Sedangkan Desa Sesela ingin mengembangkan potensi usaha material bangunan. Untuk Desa Kekait pengembangan potensi usahanya terkait rencana membentuk usaha bank sampah dengan konsep syariah dan *integrated farm*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (De Massis et al., 2015) yang mengemukakan bahwa unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

PENUTUP

Permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini masih terkait dengan permasalahan yaitu, *Pertama*, kecilnya Persentase Penyertaan modal yang diberikan Desa kepada Bumdes hal ini disebabkan karena kajian usaha belum dilakukan oleh Bumdes, kurangnya transparannya pengelola Bumdes dalam pengelolaan sehingga Desa tidak berani mengambil resiko dengan memberikan penyertaan modal yang besar ke Bumdes. *Kedua*, kurangnya kapabilitas Sumber daya manusia, dimana masih banyak pengelola yang kurang pro aktif dalam mengelola Bumdes disebabkan karena mereka memiliki pekerjaan lain atau juga karena banyak pengelola yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan sehingga kegiatan dilakukan untuk kegiatan kampanye atau permasalahan pribadi lainnya. Sistem penggajian terhadap karyawan masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka sehingga banyak karyawan keluar dari Bumdes. *Ketiga*, Kerjasama dengan pihak luar belum banyak dilakukan seperti dengan kalangan dunia usaha, pemerintah maupun dengan pihak akademisi atau Universitas. Atas dasar temuan tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengatasi permasalahan Bumdes yaitu, *Pertama*, perlunya komitmen pimpinan yang kuat dari hulu ke hilir dalam mengelola Bumdes serta perlunya pemahaman dan penguatan kepada kepala desa mengenai *good village government*, tata kelola keuangan, manajemen Bumdes; *Kedua*, perlunya penguatan SDM dengan

mengikutsertakan para pengelola Bumdes pada kegiatan-kegiatan seperti pendidikan & pelatihan; perlunya sertifikasi bagi pengelola Bumdes yang ditunjuk baik dari aspek *hardskill* maupun kemampuan *softskill*, atau meng-*hired* tenaga profesional untuk mengembangkan Bumdes; pendampingan & pembinaan bagi Bumdes secara berkelanjutan; *Ketiga*, perlunya menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kerjasama untuk memajukan Bumdes; melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengelola dengan indikator kinerja dalam menilai perkembangan Bumdes; dan *Keempat*, mengupayakan penggalian potensi usaha di desa dengan melakukan analisis kelayakan bisnis untuk menentukan ketepatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan dengan menggandeng kalangan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- De Massis, A., Frattini, F., Pizzurno, E., & Cassia, L. 2015. 'Product Innovation in Family Versus Nonfamily firms: An Exploratory Analysis'. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12068>
- Direktorat PUED Kemendes PDTT. 2015. *Rekap-Bumdes Lobar 2015*.
- Eko, S., Khasanah, I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, & Suharyanto. 2014. *Buku Desa Membangun Indonesia*.
- Etzioni, Amitai. 1992, *Dimensi Moral; Menuju Ilmu Ekonomi Baru*. Edisi Terjemahan, Penerbit Remaja Rosdakarya Bandung.
- Fikri, Ali 2010, "*Studi Fenomenologi Akuntabilitas WWF (World Wide Fund for Nature)*.", Disertasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Harto, P., & Riwandari, R. 2018. 'Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 167–187. <https://doi.org/10.5281/jakis.v6i2.115>
- Hastowiyono, Suharyanto, Yunanto, S. E., & Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.(2014. *Penyusunan kelayakan usaha & pengembangan usaha BUM Desa*.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., Lis Purnamadewi, Y., Ekonomi, F., Manajemen, D., & Bogor, P. 2019. 'Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan', *JSHP*, 3(2).
- Inapty, B. A., Fikri, M. A., & Waskito, I. 2021. 'Identifikasi Problematika Bumdes Di Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Lombok Barat', *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(2), 121–127. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.127>
- Kusuma, G., & Purnamasari, N. 2016. 'Bumdes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo'.
- Mayu, & Adlin. 2016. 'Faktor-Faktor Yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 – 2015'.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. 1997. 'Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts'. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 22, Issue 4).

- Moleong, J, Lexy. 2006. *'Metodologi Penelitian Kualitatif'* Bandung. PT.Remaja. Rosdakarya
- Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sanders, P. 1982. *'Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research'*. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 7, Issue 3).
- Srirejeki. 2018. *'Empowering Bumdes The Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) For Rural Development Case of Indonesia'*. *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20(1), 5–10.
- Suarez, K., Perez, P., & Almeida, D.2001. *'The Succession Process From a Resource and Knowledge Based View of Family Firms'*. *Family Business Review*, XIV(1).
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. 2017. *'The Role Of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation In Order Of Community Empowerment Of Villages Of Cagak Road Subang District West Java Province'*. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 15(1). www.jitbm.com
- Trevinyo-Rodríguez, R. N., & Tàpies, J. 2010. *'Effective Knowledge Transfer In Family Firms'* (Vol. 5).
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- World Bank. 1998. *'The Initiative on Difining, Monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding'*. *Social Capital Initiative Working Paper No.2*. The World Bank, Social Development Family, Enviromentally and Socially Sustainable Development Network. June 1998. (Daam <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/wkrppr/sciwp2.pdf>. 9 mei 2005).
- Yudiardi, D., & Karlina, N. 2017. *'Identification Of Supporting And Inhibiting Factors Of Bumdes (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning In Sukarame District Garut'*. In *Global Journal of Politics and Law Research* (Vol. 5, Issue 1). www.eajournals.org